

---

## DARI KEBIJAKAN KE AKSI: IMPLEMENTASI KERJA SAMA PROGRAM KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DKI JAKARTA

### *TURNING POLICY INTO ACTION: IMPLEMENTATION OF MARINE AND FISHERIES COLLABORATION PROGRAM IN DKI JAKARTA*

Kiestiko Sri Saptasari<sup>1</sup>, Aisyah<sup>2</sup>, & Yusuf Qohary<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekretariat BPPSDM

Gedung Mina Bahari 3, Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat

<sup>2</sup>Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, BPPSDM

Gedung Mina Bahari 2, Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat

e-mail : [kiestiko.sari@gmail.com](mailto:kiestiko.sari@gmail.com)

Diterima tanggal: 30 Oktober 2024 ; diterima setelah perbaikan: 9 November 2024 ; Disetujui tanggal: 10 November 2024

#### ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki cakupan sektor kelautan dan perikanan di seluruh wilayah termasuk provinsi DKI Jakarta. Latar belakang tersebut menjadi dasar dilakukannya kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan tajuk Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta. Artikel ilmiah ini mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kerja sama tersebut menjelang tahun keempat atau mendekati masa berakhirnya, dengan pengolahan dan analisis data secara deskriptif selama kurun waktu kerja sama yang berjalan sejak tahun 2021-2024. Bahasan menunjukkan bahwa sembilan kelompok rencana kerja yang menjadi target dalam pembangunan KP secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berada dalam kategori Sedang dengan total capaian mencapai 68%. Beberapa rekomendasi turut disertakan yang dapat menjadi pembelajaran untuk kerja sama lanjutan jika diperlukan.

**Kata kunci:** Jakarta, Kelautan, Kerja sama, Pembangunan, Perikanan.

#### ABSTRACT

*As an archipelagic country, the marine and fisheries sector covers the entire territory of Indonesia, including the province of DKI Jakarta. This background forms the basis for collaboration between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries and the DKI Jakarta Provincial Government, in terms of Synergy in Planning and Implementation of Marine and Fisheries Development in DKI Jakarta Province. This paper aims to describes and analyses the implementation of this collaboration period which developed from 2021-2024. The discussion reveals that the nine groups of work plans that are targeted in marine and fisheries development aim to improve the quality of life of the community, as well as general development goals are categorized as Medium with total achievements of 68%. Several recommendations are also included which can provide insight for further collaboration if necessary.*

**Keywords:** Maritime Affairs, Cooperation, Development, Fisheries.

## PENDAHULUAN

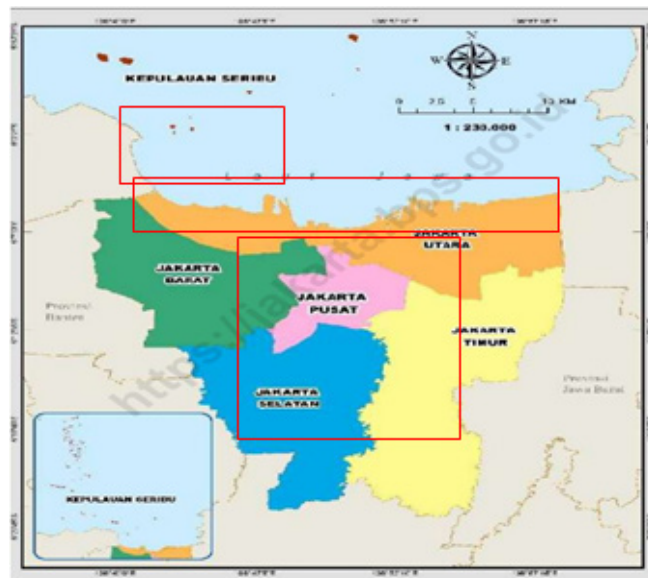
Kerja sama pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan merupakan komponen yang sangat penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan nasional, khususnya untuk menjawab tantangan yang berkaitan dengan pengembangan potensi dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu langkah awal dalam setiap kegiatan *collaborative governance* yang berorientasi pada masalah adalah untuk mencapai pemahaman bersama tentang tujuan dan pendekatan yang akan digunakan (Ansell & Gash, 2007).

Seiring dengan hal dimaksud, kerja sama pengembangan SDM dengan melibatkan mitra kerja sama merupakan sebuah sarana pengembangan jejaring dan transfer teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) c.q Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, maupun swasta akan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih optimal. Dengan berbagi informasi dan sumber daya, pemerintah pusat dan daerah dapat mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang mendesak dan mengalokasikan anggaran secara proporsional (Ferlita *et al.*, 2024). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022, kerja sama diharapkan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama. Prinsip - prinsip tersebut mencakup aspek keamanan, kepentingan nasional, kejelasan tujuan, kesetaraan, kemitraan dan tentu saja tidak menimbulkan ketergantungan. Dengan menerapkan prinsip – prinsip tersebut, pelaksanaan kerja sama dapat diupayakan akan berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang optimal.

Selanjutnya, kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertajuk “Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan” menunjukkan penerapan dari kolaborasi ini. Terdapat sembilan ruang lingkup yang dituangkan ke dalam rencana kerja yang menjadi target pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan, dan kerja

sama ini merupakan implementasi dari lima program prioritas KKP. Kelima program prioritas tersebut meliputi perluasan Kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; Pengembangan budidaya air laut, tawar, payau yang berkelanjutan; Pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; Penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut. Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan secara umum. Pembangunan sendiri secara umum didefinisikan sebagai proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik, berdasarkan norma-norma tertentu, yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan infrastruktur (Nurcholis *et al.*, 2016).

DKI Jakarta memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup menarik. Dengan wilayah yang terbagi ke dalam 3 kategori, yang meliputi wilayah Kepulauan Seribu, wilayah pesisir di Jakarta Utara, dan wilayah tengah atau murni daratan (Gambar 1); 2 wilayah pertama diperkirakan merupakan kontributor utama kelautan dan perikanan dengan pengupayaan di Teluk Jakarta. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk meninjau upaya kolaboratif pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan kelautan dan perikanan, dengan fokus pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya di wilayah DKI Jakarta demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. Peta Provinsi DKI Jakarta dengan kategori wilayahnya. (sumber peta: BPS, dimodifikasi)  
Figure 1. Map of DKI Jakarta Province with Its Area Categories. (Source: BPS, modified)

Tabel 1. Metode mengkuantifikasi capaian  
*Table 1. Method for Output Quantification*

No	Sub Ruang Lingkup	Jumlah Outcome	Nilai Capaian
1	Pengembangan riset dan peningkatan kapasitas SDM KP	5	Jika tercapai 1 dari 5 outcome pada sub ruang lingkup 1, maka nilai capaian = 20% dst
2	Penggunaan dan/atau pemanfaatan BMN	1	
3	Pengembangan program Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Kamal Muara	4	
4	Perlindungan, pengelolaan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir dan laut	3	
5	Peningkatan keterlibatan peran dan penyadartahuan masyarakat pesisir	2	
6	Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir	2	
7	Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir	3	
8	Peningkatan luasan dan efektifitas pengelolaan Kawasan konservasi peraian	2	
9	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	3	
	<b>Total</b>	<b>25</b>	

## BAHAN DAN METODE

*Review* terhadap pelaksanaan kerja sama yang berjudul “Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan”, dengan periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2024, dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai status suatu kondisi dan gejala, yang dikumpulkan dari berbagai bukti capaian kerja sama diselaraskan dengan teori-teori dan publikasi (Arikunto, 2019; Moleong, 2007).

Kerja sama mensasar provinsi DKI Jakarta secara umum, dan lokasi tertentu diantaranya pesisir bagian utara seperti Muara Kamal, Teluk Jakarta dan beberapa pulau di Kepulauan Seribu seperti pulau Tidung, Panggang, Pari, Harapan, Kelapa, Kongsi, pulau Payung, termasuk Jakarta bagian daratan yang merupakan sentra perikanan.

Persentase capaian diukur dengan rumus dasar perhitungan persentase, yang dalam hal ini adalah membandingkan antara capaian outcome di masing-masing sub ruang lingkup dengan jumlah outcome pada sub ruang lingkup (Tabel 1). Konsep persentase pada umumnya sering digunakan dalam statistik untuk menggambarkan rasio sebagai pecahan dari 100 atau menghitung bagian tertentu dari keseluruhan data yang ada (Nuryadi *et al.*, 2017).

Metode pembobotan digunakan untuk mempresentasikan distribusi skor subyek penelitian (dalam hal ini outcome) sebagaimana dalam Widhiarso (2010), sehingga diperoleh kategori capaian sebagai mana Tabel 2.

Tabel 2. Kategori Capaian  
*Table 2. Output Category*

Kategori	Persentase Capaian
Rendah	0-30%
Sedang	$70\% \geq x > 30\%$
Tinggi	$x > 70\%$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia memiliki potensi lestari perikanan laut sejumlah 12,01 Juta Ton per tahun, dan mengalami pertumbuhan nilai produksi dalam rentang waktu 2015 – 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kelautan perikanan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Anugrah & Alfarizi, 2021). Perairan Jakarta sendiri masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712, beberapa komoditas perikanan sudah mengalami *fully* hingga *over exploited* (KKP, 2022), sementara pemanfaatan komoditas pelagis kecil dan rajungan masih berpeluang untuk dioptimalkan, sementara rajungan, ikan karang, dan udang masih dapat dimanfaatkan dengan monitoring ketat terhadap upaya penangkapan (Tabel 3).

Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah, DKI Jakarta tergolong tiga besar bersama provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2023 (BPS, 2024a). Sementara jika dilihat dari persentase kontribusi PDRB perikanan terhadap PDB Indonesia per provinsi, DKI Jakarta tahun 2021 menunjukkan angka yang sangat kecil (0,04) jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia namun mengalami pertumbuhan drastis dan fluktuatif pada periode tahun 2018-2021 (hingga 10,85% di tahun 2021) (statistik.kkp.go.id). Hal ini sejalan dengan gambaran sumbangan perikanan (bersama pertanian

Tabel 3. Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan (JTB), dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712 (Laut Jawa)

Table 3. Estimation of fish stock, Total Allowable Catch, and Utilization Rate of the Fisheries Management Area (WPP) of 712 (Java Sea)

WPP			Pelagis Kecil	Pelagis Besar	Demersal	Ikan Karang	Udang	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-cumi
Laut Jawa	712	Estimasi potensi	275.486	145.863	358.832	71.526	83.820	1.481	7.360	23.508	66.609
		(ton)	247.937	72.932	179.416	57.221	58.674	1.037	5.152	16.456	46.626
		JTB (ton)	0,4	1,3	1,1	0,8	0,8	0,5	0,9	0,7	0,9
		Tingkat pemanfaatan									

Sumber: (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022)

Source: (Ministry of Marine Affairs and Fisheries, 2022)

dan kehutanan) yang mengalami pertumbuhan tertinggi ketiga (9,19%) di triwulan pertama tahun 2024, yang menunjukkan pergerakan positif dari sektor perikanan di provinsi DKI Jakarta (BPS, 2024b).

Dari segi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, sejumlah 6.750 orang pelaku utama di provinsi DKI Jakarta meliputi nelayan 3.514 orang (52%), pembudidaya ikan 1.726 orang (26%), pengolah ikan 693 orang (10,3%), pemasar ikan 636 orang (9,4%), pemasar antar pelabuhan 176 orang (2,6%), dan petambak garam 5 orang (0,1%) (statistik.kkp.go.id per 1 Oktober 2024). Melihat jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 10.684,9 ribu jiwa di tahun 2024 (BPS, 2024c), jumlah pelaku utama sektor kelautan dan perikanan hanya 0,06% dari total penduduk DKI Jakarta. Hal ini diduga karena minimnya daya tarik usaha di bidang KP sehingga pesimisme tersebut dianggap kurang dari sisi pendapatan bagi pelaku sektor perikanan. Di sisi lain pengelolaan sektor perikanan yang tidak optimal yang menjadi penyebab rendahnya produktivitas usaha dan pendapatan pelaku sektor perikanan (ipb.ac.id). Aspek paling dominan yang sangat mempengaruhi kemampuan pelaku usaha UMKM pengolahan perikanan adalah permodalan atau pendanaan usaha (Hamdani *et al.*, 2020). Perlu membuat pemetaan kondisi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK KP yang dibandingkan dengan potensi produksi KP di tiap-tiap daerah serta permasalahan educational mismatch yang menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan tenaga kerja sektor KP (Aini & Purba, 2022) jika dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama terbagi ke dalam sembilan kelompok, meliputi pengembangan riset dan peningkatan kapasitas SDM KP; Penggunaan dan/ atau pemanfaatan BMN; Pengembangan program

Pembangunan dan pengelolaan Kawasan Kamal Muara; Perlindungan, pengelolaan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir dan laut; Peningkatan keterlibatan peran dan penyadartahuan masyarakat pesisir; Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir; Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; Peningkatan luasan dan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan; Pengawasan sumber daya KP, dengan masing-masing jumlah outcome sebagaimana pada Tabel 1. Kerja sama antar lembaga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat dimungkinkan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; yang berarti dari sisi daerah mendefinisikan sebagai bentuk kerja sama yang menempatkan Kementerian sebagai pemerintah pusat di dalam konteks urusan pemerintah. Konsep governance juga menjadi relevan dalam konteks kerja sama ini, sebagaimana dikatakan oleh Roderick Arthur William Rhodes dalam (Sunu *et al.*, 2020), *governance* merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan (*new process of governing*), perubahan kondisi kaidah pengaturan (a changed condition ordered rule), atau sebuah metode baru dimana masyarakat diatur (*new method by which society is governed*) dalam (Sunu *et al.*, 2020) (Gambar 2). Hal ini menggambarkan bagaimana hubungan antar pemerintah dalam membentuk kebijakan dan mekanisme yang mengatur interaksi antar berbagai tingkat pemerintahan yang mencerminkan kerangka dasar konstitusi serta dinamika yang terjadi (Shafritz *et al.*, 2017).

Ruang lingkup dari kerja sama ini mengarah pada luaran (*outcome*) seperti lulusan bekerja di bidang KP yang merintis usaha; Rekomendasi kebijakan



Gambar 2. Tiga Tahap Penilaian Collaborative Governance dan Perencanaan Tindakan. Sumber: Ratner (2012) dalam (Sunu *et al.*, 2020)

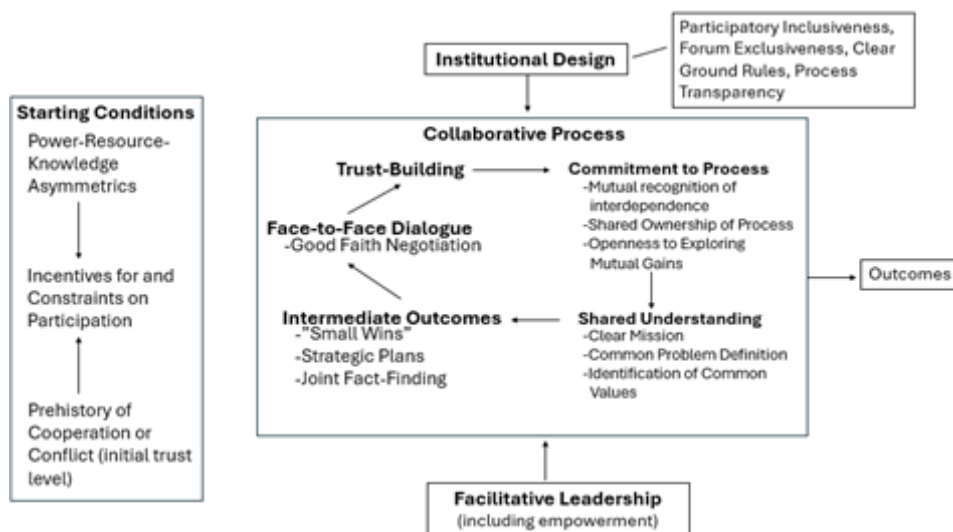
Figure 2. Three Stages of Collaborative Governance and The Action Plans. Source: Ratner (2012) in Sunu *et al.* (2020)

dari hasil kajian konsep pengembangan ekonomi kawasan sektor KP; Masyarakat yang sadar mengenai konservasi, perikanan berkelanjutan, pengembangan ekowisata Bahari, dan siap-siaga menghadapi bencana dan perubahan iklim di pesisir; Peningkatan produksi di sektor KP, termasuk pertumbuhan usaha yang mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat; Terwujudnya kelompok DPL-BM yang mandiri dan terorganisasi; Peningkatan jumlah nelayan yang mendaftarkan asuransi nelayan; Lingkungan Teluk Jakarta yang bebas IUU Fishing; Tertib perijinan bagi pelaku

usaha perikanan. Hal ini sejalan dengan konteks sinergitas kebijakan, yang diterjemahkan sebagai proses kerjasama dan sinkronisasi (penyesuaian) serta harmonisasi (keselarasan) diantara pemangku kepentingan (Gambar 3). Proses ini diharapkan dapat menghasilkan dampak kebijakan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat (public) (Satibi *et al.*, 2023).

Identifikasi terhadap kemajuan (*progress*) kerja sama menunjukkan bahwa telah dilakukan sejumlah kegiatan baik yang bersifat inisiasi maupun lanjutan dari program dan kebijakan KKP khususnya di provinsi DKI Jakarta (Tabel 4). Kegiatan yang bersifat inisiasi meliputi pembahasan awal terkait penambahan luasan kawasan konservasi melalui identifikasi potensi. Sementara kegiatan lanjutan dari program dan kebijakan KKP dalam hal ini adalah serapan lulusan dari perguruan tinggi vokasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan di Jakarta yang merintis usaha KP; Lanjutan program Sekolah Pantai Indonesia yang sudah dirintis sejak tahun 2017; Kegiatan pengawasan yang merupakan kegiatan rutin; Kegiatan penyuluhan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah DKI Jakarta, serta berbagai bentuk pelatihan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif semua pemangku kepentingan serta evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas program-program tersebut (Arikunto & Jabar, 2014).

Kerja sama telah menginjak tahun keempat dengan berbagai pencapaian, walaupun masih terdapat beberapa kegiatan yang capaiannya belum teridentifikasi (Tabel 4). Capaian perkembangan kegiatan memerlukan penguatan monitoring dan evaluasi berkala dengan detail



Gambar 3. Model kolaborasi pemerintah secara teoritik. (Sumber: Ansell & Gash, 2007)

Figure 3. Model of Government Collaboration. (Source: Ansell & Gash, 2007)

informasi untuk memperkuat gambaran hasil dari kerja sama ini, serta peningkatan koordinasi dengan Eselon 1 terkait di lingkup KKP. Dari sisi substansi, terdapat kegiatan yang bersifat teknis dan didukung riset yang

dicapai sebelum era peralihan riset dari Kementerian/Lembaga ke Badan Riset dan Inovasi Nasional pasca terbitnya Perpres nomor 78 tahun 2021.

Tabel 4. Kemajuan kegiatan Kolaborasi.  
Tabel 4. The Progress of Collaboration.

Outcome/Sub Outcome	Indikator	Capaian
Outcome 1: Pengembangan riset dan peningkatan kapasitas SDM KP		
1.1 Lulusan bekerja di bidang KP yang merintis usaha	Walaupun jumlah lulusan bersifat fluktuatif, namun terdapat trend peningkatan dan dapat menjadi indikator karena keberadaan Politeknik Ahli Usaha Perikanan di Jakarta. Lulusan Politeknik AUP Jakarta sejumlah 2.592 orang (26%) terserap sebagai tenaga kerja sebanyak 85%.	Tinggi (80%)
1.2 Rekomendasi kebijakan	Hasil kegiatan penelitian dan praktek: 1. Terpetakannya daerah penangkapan ikan di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu serta musim penangkapan sebagai dasar pengelolaan 2. Pemetaan luas tutupan mangrove sebagai dasar kebijakan penetapan tutupan lahan dan pemberian ijin penggunaan lahan seperti tambak dll 3. Prakiraan dampak giant sea wall Teluk Jakarta 4. Kajian budidaya ikan di pesisir	
1.3 Rekomendasi kebijakan	Telah dilakukan sharing data hasil kajian perencanaan pembangunan lahan di Muara Kamal yang akan di bangun oleh KKP dan DKPKP	
1.4 Penyuluhan dan penyadartahuan, termasuk pelatihan di bidang KP	Penyuluh perikanan di bawah binaan BPPSDM KKP tersebar di 41 Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, dengan kegiatan utama pendampingan kelompok dalam akses teknologi, informasi dan permodalan usaha KP (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR), penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR), pendampingan bantuan pemerintah (asuransi nelayan/pembudidaya ikan, sertifikat tanah nelayan, sarana alat tangkap ikan, minapadi, bioflok), pendirian koperasi (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam), legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil/IUMK sektor KP) (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam), sosialisasi peraturan per-UU perikanan, pendataan pelaku usaha KP (KUSUKA) dan sampling produksi (perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar dan petambak garam) dalam Satu Data KKP (BRPBATPP, 2023). Bimbingan teknis Teknik Transplantasi Terumbu Karang & Pembibitan Mangrove di Pulau Kongsu pada bulan Juni 2024.	
1.5 Pelatihan KP	Belum teridentifikasi	
Outcome 2: Penggunaan dan/atau pemanfaatan BMN		Rendah (0%)
2.1 Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan BMN	Belum teridentifikasi	
Outcome 3: Pengembangan program pembangunan dan pengelolaan Kawasan Kamal Muara		Sedang (50%)
3.1 Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	Telah dilakukan perubahan zona lindung menjadi zona RTH Taman Kota dengan terbitnya Peraturan Gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.	
3.2 Peningkatan ekonomi masyarakat melalui diseminasi teknologi pengolahan produk	Bersama perekayasa BPPSDM KP dan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kabupaten Kepulauan Seribu telah mengadakan Pelatihan Online Teknik Pengolahan Rumput Laut pada November 2021. Di samping itu terdapat ± 22 perusahaan eksportir rumput laut, yang memiliki masyarakat binaan yang turut menjadi sasaran diseminasi teknologi melalui penguatan pasar dan rantai pemasaran tropical seaweed melalui promosi dan diversifikasi pasar;	

	pengembangan produk karaginan dan agar, berikut produk turunannya serta substitusi produk lain yang diimpor, misalnya cangkang kapsul obat; pemetaan dan penataan kawasan (Ditjen PDSPKP, 2023).	
3.3 Peningkatan penyadartahuan melalui pembentukan kelompok guide wisata bahari	Belum teridentifikasi	
3.4 Rekomendasi kebijakan terkait pendataan melalui stasiun pemantauan	Belum teridentifikasi karena peralihan fungsi Stasiun Pulau Kongsi akibat adanya peralihan riset dari K/L ke BRIN Pasca terbitnya Perpres nomor 78 tahun 2021.	
Outcome 4: Perlindungan, pengelolaan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir dan laut		Sedang (66%)
4.1 Arahan pembangunan wilayah pesisir melalui pendampingan Perda RZWP3K Provinsi DKI Jakarta	Rencana Tata Ruang yang menjadi acuan dalam pemberian perizinan di wilayah perairan adalah Materi Teknis RZWP3K yang mendapatkan Persetujuan Teknis dari Kementerian KP dan sudah diintegrasikan ke dalam dokumen RTRW. Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut terbit tanggal 25 Februari 2022.	
4.2 Terlindunginya ekosistem pesisir melalui rehabilitasi ekosistem berbasis mangrove	Belum teridentifikasi, walaupun secara keseluruhan wilayah Indonesia sampai dengan 2024 telah dilakukan rehabilitasi mangrove di area seluas 1.800 hektar. Di samping itu teridentifikasi minimnya intervensi KKP karena mandat pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana SK Menhut nomor 162/Kpts-II/95 tahun 1995 tentang Perubahan Cagar Alam Laut Kepulauan Seribu menjadi TN Laut Kepulauan Seribu.	
4.3 Peningkatan kualitas perairan melalui pengendalian limbah plastik di laut	Program Bulan Cinta Laut (BCL) telah digelar sejak awal tahun 2022 di 15 wilayah pesisir Indonesia, dengan total sampah terkumpul sebanyak 23,7 ton. Pengendalian juga dilakukan melalui pelatihan pengelolaan sampah plastik sejak masa pandemi Covid-19 yang meliputi 34 provinsi di Indonesia.	
Outcome 5: Peningkatan keterlibatan peran dan penyadartahuan masyarakat pesisir		Tinggi (100%)
5.1 Terwujudnya Kelompok DPL-BM yang mandiri	Telah diberikan bantuan kepada Kelompok Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) Pulau Payung dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL) Serang berupa mesin kapal, speedboat sesuai BAST Kelompok. Terdapat 6 Kelompok DPL-BM Kepulauan Seribu, yaitu di Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Harapan, dan Pulau Payung.	
5.2 Peningkatan kesadaran terhadap wilayah pesisir, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana pesisir	Melalui kegiatan bimbingan teknis kepada siswa SLTP dan SLTA Sekolah Pantai Indonesia dan penyediaan materi pembelajaran. Telah dilakukan di SMAN 69 Jakarta, dan SMKN 61 Jakarta dengan melakukan transplantasi karang di Pulau Tidung Kecil. Sekolah Pantai Indonesia melanjutkan amanat Perpres 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut, dimana sekolah ini ditempelkan pada sekolah-sekolah formal yang ada dengan penambahan kurikulum khusus. Sejak 2017 hingga 2023, penetapan SPI sudah dilaksanakan di 14 Kabupaten dan Kota yang diikuti oleh 700 siswa/i SMP/SMA/SMK sederajat. Sementara terkait kebencanaan di wilayah pesisir, telah dilakukan kajian mengenai penyebab banjir rob di Muara Gembong Teluk Jakarta dan estimasi dampak kerugian ekonominya bagi masyarakat sekitarnya, tahun 2024.	
Outcome 6: Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir		Tinggi (100%)
6.1 Tumbuhnya usaha pengolahan produk KP	Kegiatan meliputi workshop/bimbingan teknis diversifikasi produk dan pengembangan usaha masyarakat pesisir.	
	Pengembangan pasar ikan Muara Baru, salah satunya melalui kegiatan uji mutu rutin yang dilakukan oleh DKPKP, koordinasi dengan Jakarta Tourism Forum.	

6.2 Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekowisata	Termasuk di dalamnya adalah penyediaan lahan pengembangan wisata bahari, dan sudah terakomodir dalam Perda RZWP3K Provinsi DKI Jakarta. Arah kebijakan RTRW dalam Perda RZWP3K Provinsi DKI Jakarta antara lain pariwisata maritim berkelanjutan berskala global, pengembangan kawasan ekonomi kelautan inklusif yang dilengkapi dukungan ruang hidup bagi nelayan, serta pengembangan sebagai Pusat Ekonomi Biru.	
Outcome 7: Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir		Sedang (66%)
7.1 Kawasan lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman	Belum teridentifikasi	
7.2 Diversifikasi usaha bagi nelayan pesisir melalui pelatihan	Telah dijelaskan sebelumnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang mendukung pengolahan produk KP maupun dukungan terhadap pengembangan ekowisata.	
7.3 Peningkatan jumlah nelayan yang mendapatkan perlindungan asuransi	Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sebagai Landasan hukum diterbitkannya kartu KUSUKA oleh KKP. Terdapat 6.750 orang pelaku utama yang berada di provinsi DKI Jakarta adalah yang terdata dalam KUSUKA dan merupakan pelaku utama yang mendapat perlindungan.	
Outcome 8: Peningkatan luasan dan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan		Rendah (10%)
8.1 Penambahan luasan kawasan konservasi melalui identifikasi potensi	Sudah ada pembahasan awal sebagai bagian dari proses identifikasi. Kondisi eksisting adalah sudah ditetapkan 2 kawasan konservasi perairan, meliputi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (107.489 hektar) melalui Kep. Menhut nomor 8310/KPTS-II/2002, dan Suaka Margasatwa Pulau Rambut (90 hektar) melalui Kep. Menhutbun No. 275/KPTS-II/1999 (SIDAKO, 2024).	
8.2 Ekosistem laut dan pesisir yang lestari melalui penguatan kelembagaan dan pengawasan	Belum teridentifikasi karena dapat dijalankan jika sudah terbentuk kawasannya.	
Outcome 9: Pengawasan sumber daya KP		Tinggi (100%)
9.1 Aspek pengawasan yang terkendali (kondisi perairan bebas IUU Fishing, tertib perijinan usaha, dan kesadaran melakukan aktifitas perikanan yang berkelanjutan)	Terdapat pangkalan PSDKP Jakarta untuk melakukan patroli rutin, seperti melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang beroperasi di wilayah Perairan Teluk Jakarta.	
9.2 Perlindungan masyarakat terhadap hasil olahan ikan yang bebas dari bahan berbahaya	Telah ada MOU Pengawasan SDKP bersama antara Dinas KPKP Prov. DKI Jakarta dan PSDKP dan MOU antara Pemda DKI dengan Polda Metro Jaya terkait keterlibatan PPNS dalam kegiatan Pengawasan SDKP Dinas KPKP Prov. DKI Jakarta.	
9.3 Aspek pengawasan yang terkendali (kondisi perairan bebas dari ikan asing, invasif; tertib perijinan usaha ikan hias; kesadaran masyarakat dalam usaha ikan hias)	Telah ada MOU Pengawasan SDKP bersama antara Dinas KPKP Prov. DKI Jakarta dan PSDKP dan MOU antara Pemda DKI dengan Polda Metro Jaya terkait keterlibatan PPNS dalam kegiatan Pengawasan SDKP Dinas KPKP Prov. DKI Jakarta.	



Dari segi pelaksanaan capaian kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi pokok KKP terpantau terlaksana dengan baik, namun kegiatan yang bersifat lintas sektor sedikit terkendala, antara lain intervensi dalam pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, yang masih menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini disadari membutuhkan mutual understanding dalam bentuk komunikasi dalam organisasi yang mana masing-masing pihak memiliki pemahaman sama (Sendjaja & Djuarsa, 1994). Disadari pula untuk membangun kerja sama yang efektif, diperlukan aspek-aspek penting seperti kepercayaan, kejujuran, dan komunikasi yang terbuka sebagaimana dinyatakan dalam Firdausi & Sulistyorini (2023).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kerja sama yang telah dilakukan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan capaian positif dari periode 2021-2024. Kerja sama menunjukkan integrasi antara konservasi, pendidikan, dan pengembangan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Beberapa capaian menunjukkan hasil yang memuaskan (capaian > 70%) diantaranya peningkatan keterlibatan masyarakat pesisir dan ekonomi masyarakat pesisir, peningkatan kapasitas SDM KP walaupun belum teridentifikasi jelas untuk pelatihan KP yang pernah disinergikan oleh KKP dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun masih dijumpai kendala optimalisasi sumber daya dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, namun dimungkinkan penyelesaiannya melalui pembahasan lebih lanjut dengan memaksimalkan upaya bersama selama masa berlaku kerja sama hingga Mei 2026, sehingga capaian total sebesar 68% (kategori Sedang) ini dapat meningkat.

### Saran

Dengan berkaca pada identifikasi capaian outcome dari sembilan area ruang lingkup di atas, beberapa rekomendasi dihasilkan sebagai masukan dan pembelajaran pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Rekomendasi tersebut antara lain:

#### 1. Peningkatan monitoring dan evaluasi

Penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih detail dan terperinci mutlak dilakukan sehingga dapat dicapai evaluasi implementasi kegiatan. Evaluasi capaian ini nantinya akan menjadi masukan yang

konstruktif dalam pelaksanaan kegiatan lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu inisiasi aktif dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (cq Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan) dalam mengkoordinasikan kegiatan yang memerlukan dukungan dari KKP, sehingga dapat dicapai tujuan kerja sama yang telah disepakati di awal penandatanganan dokumen. Sebab koordinasi dan kolaborasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat penting dalam penyusunan kebijakan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tepat dalam menjawab permasalahan yang ada di tingkat lokal.

#### 2. Peningkatan kapasitas SDM kelautan perikanan

KKP memiliki Politeknik AUP Jakarta yang diperuntukkan bagi 100% anak pelaku utama kelautan dan perikanan meskipun hanya 26% lulusan yang berasal dari wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi berbagai pihak dalam penyebaran informasi sekolah tinggi dengan bantuan pembiayaan oleh pemerintah, ataupun minimnya minat generasi muda untuk aktif terlibat di sektor KP. Untuk itu perlu menjadi perhatian bersama cara efektif dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat melalui pendidikan dan juga pelatihan KP.

#### 3. Penyadartahuan masyarakat pentingnya sektor kelautan dan perikanan

Upaya kampanye dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan perikanan yang berkelanjutan termasuk menjaga kebersihan wilayah perairan sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk lebih mengenal dan tertarik dengan sektor kelautan dan perikanan.

#### 4. Dukungan sinergi kebijakan lintas sektoral

Terkait pengelolaan Kawasan konservasi, perlu adanya sinergi yang terintegrasi inter Kementerian/Lembaga dalam menghadapi tantangan yang ada dalam upaya perluasan kawasan konservasi sekaligus pelestarian laut dan pesisir. Sehingga kerja sama yang sudah ada antara KKP dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu dukungan dan inline dengan kerja sama Pemprov. DKI Jakarta dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya guna mewujudkan wilayah DKI Jakarta yang lestari dan SDM yang unggul.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya seluruh kegiatan penelitian sampai selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Y. N., & Purba, Y. A. (2022). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Dan Program Link & Match Pada Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Kelautan & Perikanan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 12(1), 23. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10339>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Anugrah, A. N., & Alfarizi, A. (2021). Literature Review Potensi dan Pengolahan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 3(2), 31–36.
- Hamdani, H., Puspita, D., Farmiati, J., Murhadi, T., Arfan, R., & Heppy, H. (2020). Pemberdayaan Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan Menuju UMKM Naik Kelas. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 214–217. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.917>
- Satibi, I., Ediyanto., & Vaugan, R. (2023). Konstruksi Konsep Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pengadaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 33–46. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5855>
- Shafritz, J. M., Russell, E. W., Borick, C. P., & Hyde, A. C. (2017). *Introducing Public Administration*.
- Sunu, A. R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*, 161.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan: pedoman teoritis praktis pendidikan*. Bumi aksara. 223 hal
- BPS. (2024a). Produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku menurut provinsi (ribu rupiah). Terakhir diperbarui: 23 Februari 2024.
- BPS. (2024b). Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta triwulan I-2024. *Berita resmi statistik*, 12 hal.
- BPS. (2024c). Jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia (ribu jiwa), 2024. Data diakses pada laman [bps.go.id](https://bps.go.id), tanggal 5 Juni 2024
- BRPBATPP. (2023). Laporan kinerja triwulan II tahun 2023. 152 hal.
- Ditjen PDSPKP. (2023). Profil pasar rumput laut. 28 hal.
- Ferlita, S., Saepudin, E. A., Putri Suci Maharani, Irvan Pajar Kurniawan, Sindi Susilawati, & Riza Zidan Al Fauzan. (2024). Analisis pembangunan nasional pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents*, 1(2), 189-195.
- Firdausi, L., & Sulistyorini, S. (2023). Membangun kerjasama tim di lembaga pendidikan pada era revolusi 4.0. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (MANAPI)*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.31958/manapi.v2i1.8239>
- Imelda., Kusriani, N., & Hidayat R. (1). STRATEGI PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP BERKELANJUTAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN KUBU RAYA. *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 10(1), 59-69. <https://doi.org/10.29244/jmf.10.1.%25p>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. 5(1), 47-55.
- Moleong, & Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H., Kartono, D.T., Aisyah, S. (2016). *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*.

Universitas Terbuka. 473 hal

Nuryadi., Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-dasar Statistik Penelitian*. Penerbit SIBUKU MEDIA. 170 hal

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang pedoman kerja sama dan penyusunan perjanjian di lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. (2022)

Satibi, I., Ediyanto, & Vaugan, R. (2023). Konstruksi konsep sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Studi di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 33-46. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5855>

Sendjaja, Djuarsa, S. (1994). *Teori Komunikasi*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

Shafritz, J. M., Russell, E. W., Borick, C. P., & Hyde, A. C. (2017). *Introducing Public Administration*.

Sidako. (2024). Sistem data konservasi. Data diakses pada laman <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/> dokumen diakses tanggal 29 Mei 2024.

Sunu, A. R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*, 161.17901. (2024). Universitas Diponegoro Press

Widhiarso, W. (2010). *Pengategorian Data Dengan Menggunakan Statistik Hipotetik Dan Statistik Empiric*. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.

